



RISALAH RAPAT KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	:	2014 – 2015
Masa Persidangan	:	II
Rapat Ke-	:	--
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Selasa, 3 Februari 2015
Pukul	:	13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi II DPR RI/KK. III
Ketua Rapat	:	Ir. H. M. Lukman Edy / Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Acara	:	Audiensi
Sekretaris Rapat	:	Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI

Hadir : **A. Anggota Komisi II DPR RI:**
19 dari 50 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

1. Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA
2. Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.

F-PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)

3. Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM

F-PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)

-

F-PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)

4. H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si

F-PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

5. Ir. FANDI UTOMO

F-PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

-

F-PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

-

F-PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

6. Dr. H SA'DUDDIN, MM

BERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

F-PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

F-PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

7. Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH
8. Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos.,MH.

B. Tamu:

- Bupati Indragiri Hilir;
- DPRD Provinsi Riau; dan
- DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si/F-PKB):

Kita mulai ya Pak ya? sambil menunggu temen-temen yang lain, berangsur-angsur masuk lagi makan siang, ada yang sholat.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengadakan pertemuan ini kami Komisi II menerima surat dari pemerintah Kabupati Negeri Hilir Seminggu yang lalu, bahwa ditanda tangani oleh Pak Bupati bahwa permohonan audiensi dengan komisi II berkenaan dengan pemekaran Kabupaten Negeri Hilir, setelah itu kemudian ke komisi II menjawab dengan mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir di komisi II kemudian pimpinan menunjuk, kami untuk mewakili pimpinan yang lain untuk menerima bapak dan ibu sekalian.

Sementara ini yang sudah hadir ada Pak Rufinus dari Hanura, kemudian Pak Frans, Pak Rufinus ini dari Sumatera Utara dapil Sumatera Utara, Pak Frans dari Hanura juga dari Dapil Lampung, kemudian ada Pak Bambang dari Gerindra, Dapil Jawa Tengah Solo, mantan Walikota Solo eh mantan Bupati Solo, mohon maaf wakil bupatinya kebetulan dari PKB dulu, 2 periode pak ya? nanti berangsur-angsur temen-temen yang lain akan memasuki ruangan ini karena memang kami baru selesai jam setengah 2 tadi, Rapat dengan Menpan RB, Ombudsman Republik Indonesia dan BKN berkenaan dengan pembahasan anggaran, ini saatnya memang sedang membahas anggaran APBNP 2015.

Karena maksud dan tujuan bapak-abapak adalah untuk membicarakan soal Pemekaran Kabupaten Negeri Hilir mungkin kami membacakan dulu selintas soal perkembangan terakhir soal daerah Otonom Baru ini sehingga bisa menjadi gambaran secara komprehensif bagi bapak-bapak, nanti untuk menyampaikan apa yang perlu diketahui dan perlu disampaikan kepada komisi II ya.

Selama kurun waktu periode keanggotaan DPR RI periode yang lalu komisi II menerima sebanyak 142 usulan pembentukan daerah otonom baru yang selanjutnya dalam prosesnya oleh komisi II DPR RI sesuai dengan fungsi yang ada melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan administrasi yang disampaikan oleh masing-masing daerah, kemudian setelah melalui proses verifikasi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pertimbangan strategis lainnya, Komisi II pada akhirnya menyetujui sebanyak 87 usulan untuk ditetapkan dalam rapat

DPR, yaitu 65 usulan ditetapkan pada rapat Paripurna DPR RI ditetapkan pada Paripurna DPR RI tanggal 17 Desember 2014 ini, bukan 17 Desember ini, 17 September karena Desember itu sudah ini sudah tidak menjabat lagi, 1 Oktober kan sudah berakhir.

Selanjutnya dalam rangka merespons dan menindaklanjuti RUU usul inisiatif DPR RI tersebut, Presiden mengeluarkan surat presiden yang intinya menyetujui untuk dilakukannya pembahasan terhadap RUU dimaksud yakni melalui surat Presiden Nomor R.66Pres 2013 tanggal 27 Desember 2013 untuk pembahasan terhadap 65 RUU dan surat Presiden Nomor R.13 Press 02/2014 tanggal 27 Februari 2014 untuk pembahasan terhadap 22 RUU, kalau Negeri Hilir Selatan itu masuk yang di 22, kelompok 22 bukan yang di 65, sejalan dengan surat presiden dan juga kesepakatan antara komisi II DPR RI dengan pemerintah, Kementrian Dalam Negeri, maka pembahasan yang dilakukan adalah dengan memprioritaskan pembahasan terhadap 65 RUU usulan pembentukan DOB terlebih dahulu, sedangkan pembahasan terhadap 22 RUU lainnya akan dilakukan setelah 65 RUU ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Kemudian dari hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah terkait persyaratan teknis fisik kewilayahan dan administrasi terhadap 65 daerah terdapat 32 daerah yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan pada ketiga aspek tersebut di atas. Dan dianggap layak untuk dimekarkan, sedangkan 33 daerah lainnya masih dianggap belum memenuhi kriteria kelayakan, jadi dari 65 itu kemudian oleh DPOD atau oleh pemerintah dilakukan kajian secara teknis fisik kewilayahannya, hanya separuhnya, hanya 32 yang dinyatakan layak sementara 33 tidak dianggap layak.

Nah terhadap hasil kajian pemerintah terkait pengkriteriaan tersebut komisi II DPR RI belum dapat menerima dimana komisi II DPR RI juga meminta agar pemerintah dalam melakukan pengkajian harus mempertimbangkan pula faktor geografis, geo politis, dan geostrategis, dari masing-masing daerah, jadi tidak hanya soal teknis, ya persyaratan tehnis, tidak hanya soal fisik kewilayahan dan administrasi, tetapi juga DPR atau Komisi II DPR diharapkan mempertimbangkan juga faktor geografisnya, artinya kalau memang geografisnya itu luas, susah dijangkau, ya pelayanan publik itu terlalu jauh terhadap pusat pemerintahan, itu juga harus menjadi pertimbangan jangan hanya soal kemampuan keuangan, jumlah penduduk, tapi juga faktor-faktor geografis, geopolitis juga, itu harus dipertimbangkan.

Selanjutnya komisi II DPR RI dan pemerintah dengan melibatkan pula DPD telah bersepakat untuk membahas ke-65 usulan tersebut, nah balik lagi dia balik lagi dia, 65 nya dibahas, dimana dalam pembahasan tersebut ketiga pihak dalam rangka untuk menentukan daerah-daerah yang layak untuk dimekarkan, maka akan mempertimbangkan pula faktor geografis, geopolitis, dan geostrategis, dari masing-masing daerah dan tidak semata-mata hanya berdasarkan persyaratan yang diatur dalam PP Nomor 78 tahun 2007.

Ini yang baru masuk namanya Pak Willy dari Kalimantan Tengah fraksi PDI Perjuangan calon Gubernur Kalimantan Tengah, jadi komisi II ini bupatinya ada 15 Pak, mantan bupati jadi anggota komisi II ada 15, mantan gubernur ada, calon gubernur ada, calon bupati banyak, mantan Menteri juga ada, pimpinan-pimpinan DPR semua di komisi II, Calon Presiden Insya Allah ada, Ketua DPR Pak Setya Novanto di sini, Ketua MPR Pak Mahyudin, Pak Mangindaan juga disini, jadi ini memang, pamong-pamong lah disini ini banyak, kita ini saja yang preman yang lain pamong-pamong.

Kami lanjutkan hingga berakhirnya periode keanggotaan 2009-2014 pembahasan terhadap 65 RUU belum dapat diselesaikan dan komisi II DPR RI dalam rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 September 2014 merekomendasikan agar 65 RUU yang belum selesai pembahasannya maupun 22 RUU yang belum sempat dibahas dapat dilanjutkan pembahasannya oleh DPR RI periode sekarang, dengan pemerintahan yang baru. Cuma ini yang terakhir ini pantas juga untuk diketahui.

Terhadap rekomendasi mengenai kelanjutan dari 87 RUU pembentukan DOB yang belum dapat di tetapkan menjadi Undang-Undang tersebut komisi II DPR RI belum, eh Komisi II DPR RI mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

carry over dalam pembahasan Undang-Undang, sehingga atau kebijakan tersendiri terkait rekomendasi yang diberikan 2014. Jadi tidak ada carry over, harus mulai dari awal lagi nah

begitu. Dan begitu berakhir masa jabatan periode yang lalu ya habis, nah ini harus kita mulai dari awal lagi kecuali misalnya komisi II bersepakat untuk melanjutkan pembicaraan yang sudah dilakukan sebelumnya.

- b. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana akibat dari perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemekaran maupun penggabungan daerah juga mengalami perubahan. Kemudian sehubungan dengan hal ini.

Ini kami perkenalkan salah satu Pimpinan komisi II juga namanya Pak Achmad Riza Patria dari Partai Amanat Nasional eh mohon maaf dari Gerindra, ini orang dekat Prabowo, sebelumnya DKI Pak ya? dapilnya DKI. Hari ini memang banyak sekali kabupaten-kabupaten yang menunggu bukan saja 87 DOB yang sudah menjadi peninggalan komisi II sebelumnya tetapi juga DOB-DOB yang baru yang menunggu kesempatan untuk dimekarkan juga, sedang menunggu informasi keputusan dan kesepakatan komisi II terhadap pembahasan lanjut tentang DOB di seperti apa? nah sebelumnya komisi II juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pembicaraan secara khusus tentang kebijakan untuk BOD ya? mudah-mudahan masa sidang berikutnya sudah bisa dibicarakan karena masa sidang sekarang ini kemungkinan Kita tidak punya waktu untuk bicarakan secara komprehensif, karena komisi II dipenuhi dengan agenda.

Pertama menyelesaikan agenda perubahan Perpu Pemilihan Kepala Daerah Bupati Walikota Dan Gubernur, mungkin tidak termasuk ini Indragiri Hilir masih lama ya? yamasih lama tetapi tetap menjadi tahun berapa kalau Indragiri Hilir 2018 itu gabungannya ke 2018, tetap tahun 2018, jadi ada penggabungan dalam rangka mengejar pemilu serentak secara nasional.

Masa sidang ini Komisi II serius membahas APBNP 2015 karena pemerintahan ini pemerintahan baru, seharusnya APBNP itu pertengahan tahun baru mulai dibahas ini di dimajukan karena pemerintahan baru ini ingin menyesuaikan dengan visi dan misi baru tergambar dalam APBN, oleh karena itu masa sidang ini mungkin hampir tidak ada pembahasan Komisi II berkenaan kebijakan DOB maupun berkenaan dengan daerah-daerah yang minta dimekarkan, tetapi paling tidak secara internal memang kami akan membuka persoalan ini DOB ini, bahkan dalam satu tahun 2015 ini memang belum ada kesepakatan secara penuh tetapi paling tidak sudah ada pembicaraan-pembicaraan di Komisi II paling tidak bisa menyelesaikan 25 DOB. Selama tahun 2015 ini.

Mudah-mudahan apa yang bapak-bapak harapkan nanti bisa masuk dalam kualifikasi-kualifikasi yang kami sampaikan tadi.

Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, para anggota yang terhormat.

Para Tamu dari Indragiri Hilir selanjutnya kami persilakan untuk menyampaikan aspirasinya perkembangan dan harapan-harapannya kepada komisi II, sebelumnya kami minta diperkenalkan tamu-tamu ini, kami persilakan.

ASISTEN I (STAF AHLI BUPATI INDRAGIRI HILIR):

Terima kasih Pimpinan,

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

semua dalam keadaan sehat walafiat, pertama-tama kami
suai dengan surat kami yang kami sampaikan tertanggal 13
jadwal Audiensi, maka pada hari ini kami telah diterima dan

sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

Nah sejalan dengan ini keinginan kami mungkin sebagaimana yang telah bapak uraikan tadi
ingin mendapatkan gambaran yang jelas tentang itu,

KETUA RAPAT:

Mungkin diperkenalkan dulu pak,

ASISTEN I/STAF AHLI BUPATI INDRAGIRI HILIR (DARUSSALAM):

Makanya pada hari ini kami datang lengkap Pak unsur pemerintah daerah, eksekutif-legislatif
dan tim pemekaran dari Kabupaten. Nah untuk itu mungkin pertama saya perkenalkan, saya sendiri
mewakili dari pemerintah daerah, jabatan sata Asisten I, nama saya Darussalam dan di sebelah kanan
saya Pak Dani Nursalam, Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, di sebelah kanan Pak Feriyandi Wakil
Ketua, sebelah kanannya lagi Bapak Yufuf Said Ketua Komisi I.

F-GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, SH., MH., M.Si):

Interupsi Pimpinan, tolong dari Partai apa di sampaikan ya pak ya? Ketua DPRD dari mana?

ASISTEN I/STAF AHLI BUPATI INDRAGIRI HILIR (DARUSSALAM):

Pak Ketua DPRD ini dari Partai Kebangkitan Bangsa pak, Pak Miryandi Wakil Ketua dari partai
Golkar, kemudian Pak Yusuf Sait Ketua Komisi I dari partai Golkar, kemudian pak Edy Gunawan dari
Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian di sebelah kiri kami Pak Muhammad Arfah anggota DPRD
provinsi Riau, dapil Inhil dari partai PPP, kemudian di sebelah kami lagi Pak Asbedah, beliau ini asisten
bupati bidang hukum, di sebelahnya lagi Pak Fajar Hussein Asisten Bupati Bidang Pemerintahan, di
ujung sekali Pak Abdul Wahid ini juga anggota DPRD provinsi Riau dari Partai Kebangkitan Bangsa,
kemudian di belakang staf ahli bupati bidang pemerintahan, dan staf ahli bidang hukum, kemudian di
belakang anggota Komisi I DPRD kabupaten Indragiri Hilir, ditambah dengan anggota DPRD
Kabupaten Indragiri Hilir Dapil Inhil Selatan, ditambah juga dengan tim dari pemekaran baik dari
Selatan maupun dari Utara.

Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati,

Mungkin sekali lagi saya sampaikan maksud dan tujuan kami datang ke sini ingin
mendapatkan informasi yang jelas, gambaran jelas, karena sebagaimana yang telah disampaikan oleh
Bapak Pimpinan tadi, begitu berakhirnya periode DPR 2009-2014 pembahasan ini, apakah namanya
distop atau ditunda dan direkomendasi kepada periode 2014 atau periode sekarang ini, hingga kami
juga dalam kesempatan ini mungkin ingin mendapatkan gambaran jelas secara sepiantas tadi,
sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Pimpinan, bahwa DPR tidak mengenal carry over, artinya
berakhirnya masa tugas periode yang lalu maka berakhir pula segala sesuatu untuk periode yang baru
ini akan dimulai dari nol kembali, kalau tidak salah apa yang Bapak sampaikan tadi saya tangkap
begitu.

Nah mungkin ini nanti dari kawan-kawan semuanya mungkin lebih dapat memperdalam dalam
diskusi kita ini sehingga nanti bagaimana sebenarnya kondisi untuk pemekaran daerah otonomi baru,
sementara kita tahu khusus untuk pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Indragiri Hilir khususnya

ada kelompok 22 yang pada saat DPRD periode yang, DPR membahas atau sudah masuk usul inisiatif DPR hanya saja di stop pembahasannya sehingga ini yang ingin kami dapatkan gambarannya. Saya rasa ini pak, mungkin selanjutnya mungkin Pak Ketua, silakan Pak Ketua.

KETUA DPRD INDRAGIRI HILIR (DANI NURSALAM):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi II serta seluruh Bapak-bapak anggota Komisi II;
Yang kami hormati Bapak asisten I Aparatur kabupaten yang berkesempatan hadir di tengah-tengah kita;
Yang kami hormati sahabat-sahabat Pimpinan Dewan dan rekan-rekan Komisi I;
Kami pemerintahan hukum pak, kalau di DPRD kami, serta
Bapak-bapak khususnya masyarakat yang bergabung dalam perjuangan baik itu DPPK Insel maupun juga teman-teman yang berjuang di Inhil Utara.**

Kami tentunya mengucapkan teman kasih yang sebesar besarnya atas kesempatan yang diluangkan oleh komisi II untuk menerima kedatangan kami ini, tentunya ini merupakan momen yang sangat strategis bagi kami dalam rangka menyuarakan aspirasi Masyarakat.

Perlu kami sampaikan di forum yang terhormat ini bahwa aspirasi masyarakat yang masuk yang berkembang di Indragiri Hilir dan masuk dalam pembahasan DPR itu dimulai pada tahun 2008 yang lalu, yaitu komponen masyarakat yang ada di utara dan ko,ponen masyarakat yang ada di selatan, yang mana berkeinginan yang kuat bahwa Indragiri Hilir ini mau tidak mau mesti dimekarkan, banyak pertimbangan-pertimbangan kenapa kami lembaga DPRD bersama masyarakat menyetujui sesuai amanat PP 78 bahwa memutuskan untuk terbentuknya pemekaran Indragiri Utara dan Indragiri Selatan.

Perlu kami sampaikan ke bapak-bapak Ibu sekalian, bahwa Indragiri Hilir itu memiliki 20 kecamatan, 20 kecamatan itu dengan jumlah penduduk lebih kurang 800.000, nah kalau dilihat dari persyaratan yang diamanahkan oleh PP 78 itu sudah memenuhi persyaratan kami menyarankan seperti itu. Nah tadi Pak pimpinan mengatakan bahwa ada pertimbangan secara geografis, geopolitik dan geostrategis, menurut hemat kami juga ini sudah memenuhi persyaratan untuk itu, tetapi dalam perjuangan untuk keinginan pemekaran ini, yang sejak di suarakan, diputuskan oleh DPRD tahun 2008 sampai detik ini tidak jelas nasibnya seperti apa, perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak yang mengawali tugas sebagai anggota DPRD 2.000 anggota DPR RI sebagai 2014-2019 ini harapan kami bahwa kalau memang komisi II berkeinginan memiliki target pada tahun ini ada 20 DPOD kami mohonkan di Indragilir ini masuk dalam kelompok 25 yang merupakan target pada Komisi II.

Perlu kami sampaikan kepada Bapak-bapak sekalian, hari ini saja Pak saya contohkan saja dalam hal kemampuan keuangan, hari ini 2015 kita sudah ketok palu dari APBD kita, dari APBD kita yang kita sahkan, pendapatan kita hanya 1,8 triliun sementara kebutuhan untuk menggaji pegawai itu sampai 1 triliun. Sehingga kami memiliki anggaran untuk pembangunan itu lebih kurang 800 Milyar, kita enggak tahu hari ini sudah mendengungkan bahwa dana perimbangan itu dipastikan akan terjadi penurunan, untuk tahun 2015 ini dikarenakan persoalan harga minyak dunia katanya seperti itu, ini juga itu salah satu juga pertimbangan. Dalam hal geografis perlu kami sampaikan Pak, dari 20 kecamatan itu hanya 5 kecamatan yang bisa dilalui Pak, dalam hal transportasi hanya 5 kecamatan yang bisa dilalui dengan kendaraan roda 4, semuanya dilalui dengan transportasi yang melalui perairan, melalui laut, otomatis dalam hal rentang kendali pemerintahan ini sangat jauh antara pusat pemerintah dengan masyarakat. Nah untuk ini pada kesempatan ini kami bermohon kepada Bapak-bapak yang akhirnya mengambil keputusan bersama Kementerian Dalam Negeri sekiranya pada tahun

get Komisi II bahwa Inhilir ini dapat dimekarkan menjadi 3

mpaikan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini juga bisa saling berdiskusi dengan bapak-bapak sekalian disini sehingga lebih mendalami apa yang menjadi latar belakang bagi kami untuk memekarkan kabupaten ini.

Demikilah, mohon maaf atas perhatian dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

ASISTEN I/STAF AHLI BUPATI INDRAGIRI HILIR (DARUSSALAM):

Terima kasih Ketua, mungkin selanjutnya Pak Arbah, ini Anggota DPRD Propinsi Riau, mantan Ketua Pansus pemekaran, dan juga dapil beliau ini di Inhil. Silakan Pak.

ANGGOTA DPRD PROPINSI RIAU (MUHAMMAD ARFAH):

Terima kasih Pak Darussalam,

Bismilahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Bapak Pimpinan dan anggota Komisi II yang kami hormati, langsung saja Pak karena ini ceritanya sudah 10 tahun yang lalu kebetulan saya adalah mantan Ketua Pansus Pemekaran tahun 2008 yang lalu pak, kita sama-sama memahami bahwa sesungguhnya tujuan pemerintah itu pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, solusinya kalau kami Pak satu saja pak adalah pemekaran, daerah otonom baru, tidak ada solusi yang lain, karena kalau melihat kondisi geografis daerah Indragilri Hilir memang spesifik pak. Di sana disebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kepri pak, masyarakat di sana banyak belanja ke Batam, di sebelah selatan itu berbatasan dengan propinsi Jambi, hari ini masyarakat itu selalu alasannya begini Pak, kalaulah kita ini tidak bisa mekar-mekar, kenapa propinsi tetangga bisa, bergabung saja kita ke tetangga sebelah, itu bahasa yang kita terima pak itu satu,

Yang kedua saya ingin catatan bahwa Indargiri Hilir ini untuk diketahui, luas wilayahnya kalau saya bandingkan di pulau Jawa ini mungkin 4 kabupaten hari ini Indragiri Hilir satu pak, 120.000 kilo lebih persegi pak, dengan kondisi geografis yang disampaikan oleh Pak Ketua DPR, bahwa kami itu hanya 4 kecamatan dari 20 yang hari ini ada, dilalui transportasi darat selebihnya itu perairan Pak.

Nah ini jadi kami minta kepada tuan-tuan, bapak-bapak yang kami hormati dengan sangat mengiba bahasanya boleh Pak, tidak ada lagi jawaban yang kami harapkan adalah tolong dengan hati nurani bukan Hanura ya? hati nurani bahwa pemekaran wilayah daerah otonomi baru di selatan utara di negeri hilir tolong ini menjadi catatan penting dan senantiasa diingat karena apa Pak, sudah 12 tahun yang lalu sudah kami perjuangkan Pak, bicara tentang persyaratan Pak sebagaimana diamanatkan dalam PP 78, dari tahun 2008 sudah terpenuhi Pak, memenuhi persyaratan pak, bahkan kajian dari universitas Padjadjaran, universitas Indonesia, yang kami anggap qualified hasilnya itu sudah merekomendasikan bahwa memenuhi persyaratan, tapi entah mengapa Pak dalam perjalanannya 10 tahun belakangan tidak bisa Pak, kami tidak tau, nah kami pahami pak, bahwa hari ini kami berada di sebuah gedung yang mana gedung ini adalah gedung politis jadi kami juga bermohon secara politis, mohon persoalan pemakaran daerah otonom baru, Ini juga menjadi catatan penting yang kami bawa pak.

Hari ini kami hadir dengan membawa masyarakat pak, tidak ada nuansa politik Pak, tidak ada berpikiran bahwa ini berkuasa sama sekali tidak pak, tidak ada keinginan ini hanya ingin mendapatkan kue dari pemerintah pusat tidak pak, tapi semata-mata kami ingin mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan Pak, sekali lagi saya garis bawahi kebutuhan masyarakat Indragiri Hilir Pak bukan kemauan

...makan nasi kebutuhan Pak, kalau tak makan kami matilah, ...ng Pak, yang kami hormati dua persoalan yang kami bawa, ...kemauan kita, kemauan kita Pak, karena kalau berbicara kemampuan financial, kita terbuka saja konon kabarnya dulu entah 10 atau 5 tahun yang lalu kalau bicara pemekaran Pak bicara amunisi Pak, konon kabarnya dulu Pak, kalaulah dulu sampai hari ini tak mekar-mekar kabupaten Indragili Hilir ini Pak, karena kami miskin pak, kami ini datang Pak, kawan-kawan ini dari daerah terpencil, beda di pulau Jawa Pak, mohon maaf satu liter bensin premium bisa menjangkau 2 kecamatan kami, 3-4 hari bermalam di jalan Pak baru bisa sampai Pak, di Ibukota kabupaten. Sudah umur usia kabupaten itu hampir 50 tahun Pak pemekaran, satu-satunya kabupaten di provinsi Riau yang belum pernah mekar-mekar adalah Indragiri Hilir Pak, itu lah yang kami harapkan Pak.

Jadi kami datang ini adalah murni karena kebutuhan masyarakat yang lebih kurang 400.000 jiwa eh 800.000 jiwa itu Pak ya, kemudian juga saya sampaikan di terakhir Pak kami baik dari pemerintah sudah sangat-sangat pro aktif Pak, pemerintah kabupaten Indragiri Hilir, kawan-kawan di DPRD Kabuapten, dan Kawan-kawan di Provinsi, sangat mendukung sekali Pak makanya hari ini kalau selatan bicara persyaratan, saya berani katakan karena kebetulan saya mantan Ketua Pansusnya dulu, dari 4 tahun yang lalu sudah tepenuhi persyaratan Pak, nah ini utara pak, kawan-kawan juga kebetulan hadir, sudah mempersiapkan juga itu pak, jadi kami berharap ke depan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu lama, dengan hormat Pak kami minta kepada tuan-tuan di Komisi II ini dengan hati nuraninya tolonglah kami bantu Pak, bantulah kami di daerah tidak ada sama sekali nuansa politik, tidak ada persolanan tendensi apa-apa, kecuali ingin memenuhi kebutuhan masyarakat kami Pak, persoalan pelayanan infrastruktur, pelayanan publiknya, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakatnya, lain tidak pak.

Cuma itu saja Pak, terima kasih. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan, sekali lahi kami ucapkan terima kasih.

Wabilahitaufik walhidayah. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

ASISTEN I/STAF AHLI BUPATI INDRAGIRI HILIR (DARUSSALAM):

Terima kasih Pak Arfah, jadi bapak-bapak mungkin ini lah yang kami selama ini sangat rasakan di Kabupaten Indragiri Hilir itu, sebagaimana yang disampaikan Pak Lrfah tadi memang kondisi geografis kami ini sangat spesifik, hanya 4 kecamatan yang sampai hari ini kita tempuh dengan kendaraan darat, selebihnya kita menggunakan transportasi air dengan kondisi memang yang masih sangat-sangat sulit, mungkin untuk berikutnya silakan Pak Wakil Ketua, Pak Feriyandi silakan Pak, sebentar Pak Wahid ini Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Inhil Silakan Pak Wahid.

ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU (WAHID):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Yang terhormat Pimpinan Komisi beserta anggota Komisi II.

Langsung saja pak, apa yang disampaikan oleh teman-teman dan Pemerintah kabupaten Inhil itu kondisinya seperti itu adanya bahwa Indragiri Hilir ini pemekaran ini sebuah kebutuhan, bukan kebutuhan pemerintah saja, tapi ini adalah kebutuhan masyarakat, kami ingin menggambarkan dari pusat Ibukota kecamatan yang namanya Blengkong ke pusat Ibukota kabupaten itu pak, ditempuh dengan waktu 6 jam. Dari sisi pelayanan terhadap masyarakat inikan sungguh menyulitkan masyarakat dalam hal berurusan, sehingga ini menimbulkan cost yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat, mengurus segala sesuatu apapun lah bentuknya berkaitan dengan administrasi

di alam yang daerahnya sangat gambut, rawa, sehingga kalau as dengan kabuoaten yang luas seperti itu, oleh pemerintahan saya pastikan pembangunan akan terjadi kelambatan. Kalau dimekarkan setidaknya ini akan menumbuhkan semangat baru bagi Pemerintah untuk mengembangkan dan mensejahterakan rakyat.

Oleh karena itu kami atas nama masyarakat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten ini meminta tolong, apalagi Pak Lukman Edy ini kan daerah pemilihan sana dia tahu benar bahwa ini menjadi harapan kami ke depannya di tahun 2015 ini bisa di mekarkan, Indragiri ini menjadi kabupaten, ini saja yang ingin kami sampaikan bahwa ini kami bermohon dari masyakat juga bahwa ingin meminta ini dimekarkan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

KETUA RAPAT:

DPRD provinsi sudah ini, sudah ya?

ASISTEN I/STAF AHLI BUPATI INDRAGIRI HILIR (DARUSSALAM):

Terima kasih pak Wahid, berikutnya mungkin ada satu orang, adi memang be;um saya perkenalkan, Anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Amanat Nasional Pak Musafa Asikin, sekaligus mungkin ada yang mau disampaikan silakan pak.

ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU (MUSAFA ASIKIN):

Baik, terima kasih atas kesempatan
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Pimpinan komisi yang saya hormati, mungkin ringkas saja saya cukup menambahkan apa telah teman-teman sampaikan.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak, saya perkenalkan satu lagi anggota Komisi II, Pak Fandi Utomo, dari partai demokrat dapilnya Jawa Timur I.

ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU (MUSAFA ASIKIN):

Terima kasih Pimpinan, saya perkenalkan nama saya lengkap H. Musafa Asikin dari daerah yang pemilihan Indragiri Hilir fraksi PAN DPRD propinsi Riau, saya ingin menambahkan sedikit saja Pak, sebenarnya apa yang teman-teman sampaikan sebenarnya inilah fakta yang terjadi hari ini, yang lebih menyedihkan isu tentang pemekaran ini senantiasa selalu dijadikan komoditi politik oleh para calon Bupati, para calon gubernur karena janji-janji manis di saat mereka berkampanye, bersosialisasi, prinsipnya memekarkan kabupaten baru ini dari selatan maupun utara, jadi ini dimanfaatkan untuk dijadikan komoditi politik saja tapi pasca pemilu, pasca pilkada kadang-kadang ini hilang lenyap habis tiada berkesan. Yang disalahkan tentu jawabannya tentu DPR RI pak, yang konon katanya kalau menurut Pak H. Irfah itu kalau memang amunisinya kurang image ini Pak untuk kita hilangkan di tengah masyarakat, bahwa apa yang berkembang bahkan ini menjadi opini di tengah masyarakat mimpi untuk bisa pemekaran apalagi sampai di daerah selatan yang memang dukungan finansialnya itu mungkin ya saya rasa mungkin sama-sama kita ketahui Pak Lukman Edy juga berasal dari Indragiri

menyangkut harkat, dan keinginan masyarakat banyak, jadi
ini duduk di Komisi II ini dimana dulu kita sudah tahu bahwa
ah masuk dalam prolegnas pak, saya juga baru mengikuti
karena memang saya dapil Indragiri Hilir tapi tidak berdomisili di indragiri Hilir.

Jadi ini saja yang ringkas dapat saya tambahkan, terima kasih atas kesempatan, mohon maaf
kalau ada kekurangan.

Wabillahitaufik Walhidayah, Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mungkin kami masih lanjutkan ini Pak dari Pak Feriyandi Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Indragiri Hilir, silakan Pak.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (FERIYANDI):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi II DPR RI beserta seluruh anggota;
Rekan-rekan dari Anggota DPRD Provinsi Riau; dan
Rekan-rekan dari Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir; serta
Masyarakat dari Inhil Selatan dan Inhil Utara Pak.

Bapak Ibu sekalian saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kalau
berkata mimpi Indragiri Hilir Selatan dan In hilir Utara ini sudah terlalu panjang mimpi kita sebetulnya,
mimpi masyarakat kami Pak, ya kalau taimata mimpinya mungkin tidak terlalu banyak Pak, sehingga
sampai hari ini kita juga belum terwujud, saya juga ingatkan mungkin saya masih ingat pada 12 tahun
yang lalu saya masih ingat, bahwa Pak Lukman Edy ini adalah salah satu Ketua presidium Inhilil Utara,
jadi tak salah kita datang ke sini betul tepat, jadi saya rasa kita sudah tepat datang kesini, ini memang
adalah tugas besar juga salah satunya Pak Lukman Edy sudah ada disini, saya pikir mimpi Pak
Lukman Edy sama dengan mimpi kita, saya katakan demikian Pak karena ya sebagai yang di
sampaikan oleh pembicara terdahulu Pak Arfa kalau bercerita amunisi, biji cukong, seperti isu-isu dulu
mungkin itu juga mudah-mudahan mungkin masa-masa lalu, saya pikir bapak-bapak yang hari ini di sini
mungkin tidak seperti itu saya pikir karena kami cukong tidak punya Pak, kami tidak ingin juga terjadi
pada pemekaran kepulan Riau memberikan korban, korban pada masa lalu, yaitu pemekaran
kepulauan Riau dan hari ini kita tidak ada cukong-cukong untuk pemekaran ini, ini murni perjuangan
rakyat, perjuangan kami masyarakat Indragiri Hilir.

F-HANURA (Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, SH., MM., MH):

Interupsi Pimpinan,

KETUA RAPAT:

Pak Rufinus.

NA HUTAHURUK, SH., MM., MH):

ologi tadi tidak usah disampaikan di sini Pak masalah cukong-cukong itu tolong kalau bisa jangan disampaikan di sini, jadi kalau memang ada aspirasi yang berkaitan dengan keinginan sampaikan sajalah, jadi jangan kita membuat persoalan baru ya kan, betul bahwa anda mengatakan tadi tidak seperti itu, tapi saya rasa yang lalu juga belum tentu juga seperti itu, jadi tolong supaya terminologi ini kalau memang hanya inspirasinya harus diberikan masuk saja ke topik, kita akan terima, saya malah mengatakan kalau boleh lebih cepat lebih baik, karena kita harus masuk ini di Prolegnas tanpa itu tidak ada, jadi kita tidak usah berbasa basi kiri kanan, ini sudah 8 tahun 12 tahun tidak berjalan poin aja, pointersnya apa? jadi mohon maaf ini dari undangan supaya penyampaian ini sedikit lebih inilah, terima kasih Pimpinan.

MASYARAKAT:

Interupsi Pak, masyarakat.

KETUA RAPAT:

Lanjutkan dulu, lanjutkan.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (FERIYANDI):

Terima kasih Pak, mohon maaf mudah-mudahan kami juga tidak sampai ke sana berfikirnya pak. Terima kasih Pak ya kami pada intinya sangat berharap sekali, karena pemekaran ini merupakan kebutuhan masyarakat, dan merupakan kebutuhan masyarakat Indragiri Hilir memang harus mekar, sebagaimana tadi sampaikan tadi bahwa Indragiri Hilir ini adalah salah satu Kabupaten yang luas wilayah sangat besar, rentang kendali pelayanan pemerintahan sangat sulit, apalagi alam dan juga geografisnya juga yang sulit yaitu perairan, hanya beberapa saja yang bisa dilewati oleh darat, bahkan kita pergi ke kecamatan saja Pak harus bermalam, tidak bisa untuk pulang hari, karena memang transportasi laut itu sangat terbatas, biasanya hanya bisa pergi, besok baru bisa pulang, artinya pada kesempatan ini kami memohon bahwa harapan kami sangat besar sekali supaya Inhilir Selatan dan Inhilir Utara ini masuk dalam Prolegda, eh Prolegnas untuk dibahas pada tahun ini, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

ASISTEN I/STAF AHLI BUPATI INDRAGIRI HILIR (DARUSSALAM):

Terima kasih pak Feriyandi, mungkin kita juga mendengarkan juga aspirasi langsung dari masyarakat disini dari selatan kami persilakan Pak Sarban dari DPPK, Pemekaran Inhil Selatan, silakan Pak Sarban.

MASYARAKAT INDAGRI HILIR SELATAN (SARBAN):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu, kita sepakati ini sampai jam tiga ya? tapi mohon disampaikan singkat-singkat Pak, mohon singkat-singkat dari Selatan 1 orang, dari Utara 1 orang ya silakan pak.

AN (SARFAN):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

**Yang terhormat pimpinan komisi II DPR RI beserta anggota;
Yang terhormat para delegasi dan Pemerintahan Indragiri Hilir;
Anggota DPRD Indragiri Hilir; dan juga
Anggota DPRD provinsi Riau beserta tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir.**

Kami dari Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan, barangkali saya perkenalkan dulu di sebelah kiri saya ini Mohammad Kamal Al Kubro, Ketua Dewan Presidium, kemudian di sebelah kanan saya Muhammad Taufan, Sekretaris Dewan Presidium, kemudian di belakang saya Pak Bashir Wakil Ketua Dewan Presidium, kemudian saya sendiri Sarfan Firmansyah kordinator Litbang sekaligus juru bicara Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan.

F-HANURA (Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, SH., MM., MH):

Interupsi Pimpinan, ini hanya sekedar pemberitahuan saja, kebetulan saya di Baleg supaya kita tidak berlama-lama hari ini terakhir masuk Prolegnas, ini menjadi catatan jangan nanti kita lagi disalahkan, jadi segera berikan kalau mau diberikan, apa sikapnya, hari ini terakhir di Prolegnas, jam sudah menunjukkan jam 3. Jadi tidak usah kita berleha-leha disini kita sudah tangkap intinya jadi mohon maaf, saya tidak mau memotong ya hanya supaya kita tahu ini schedule dari sini ketat, jadi supaya Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian memahami proses bagaimana masuk, karena begitu besok hari ini tidak masuk, selesai kita 5 tahun, terima kasih Pimpinan.

MASYARAKAT INDAGRI HILIR SELATAN (SARFAN):

Terima kasih Pak singkat saja, kami ingin sampaikan bahwa pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan ini di mulai dari tahun 2000 yang lalu, jadi kalau kita urut ini sudah 15 tahun, karena itu kami harapan kami Cuma satu didalam kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana Kabupaten Indragiri Selatan ini bisa masuk dalam prolegnas, dan kita berdo'Anggota bersama-sama, sebagai perwujudan kita pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan ini bisa masuk dan di sahkan menjadi sebuah DOB baru, apakah itu daerah persiapan dan lain sebagainya.

Barangkali itu saja dalam kesempatan yang berbahagia ini, lebih kurang mohon maaf, kami akhiri.

Wabilahitaufik Walhidayah, Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

ASISTEN I/STAF AHLI BUPATI INDRAGIRI HILIR (DARUSSALAM):

Baik, terima kasih, selanjutnya dari Inhil Utara Pak H. Ruslan, silakan

MASYARAKAT INDAGRI HILIR UTARA (H. RUSLAN):

Terima kasih,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi II.

wilayah Inhil Utara itu sama dengan Inhil Selatan sudah 14 disinisegera merekomendasikan pak, lengkap dengan data ini, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

ASISTEN I/STAF AHLI BUPATI INDRAGIRI HILIR (DARUSSALAM):

Silakan mungkin yang terakhir ini Pak Surya Lesmana.

KETUA BADAN PEMEKARAN (SURYA LESMANA):

Terima kasih, kebetulan saya sebagai Ketua Badan Pemekaran BPD, badan pemekaran itu sendiri, sebagai badan pekerjanya, saya hanya ingin menambahkan Pak, saya pikir dalam kesempatan ini kami warga dari wilayah utara Indragiri Hilir, meminta semacam tanggung jawab dari Pak Lukman Edy dan rekan-rekan yang berasal dari daerah pemilihan dari sana. Jadi ada tanggung jawab tugas dan kami juga meminta ada tanggung jawab emosional yang kami inginkan dari Pak Lukman Edy dan kawan-kawan, sehingga kami tidak tahu prosesnya seperti apa, tapi yang kami inginkan adalah hasil mudah-mudahan kami pulang ini dapat membawa hasil yang sangat baiklah. Jadi saya pikir itulah tanggung jawab ini kami serahkan kepada Pak Lukman Edy dan rekan-rekan karena bola ini ada di DPR RI. Tidak ada lagi wakil kami selain dari Bapak dan rekan-rekan saya pikir itu dari kami, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

ASISTEN I/STAF AHLI BUPATI INDRAGIRI HILIR (DARUSSALAM):

Terima kasih Pak Surya, mungkin kami menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Rufinus, Pak Rufinus bahwa pada hari ini mungkin batas terakhir kita menyerahkan persyaratan agar masuk dalam prolegnas 2015 untuk menjadi daerah otonomi baru yang sesuai dengan pimpinan sidang sampaikan tadi, ada di targetkan 25 DOB pada tahun 2015 ini. Nah pada hari ini ingin saya sampaikan untuk Indragiri Selatan ini, persyaratan administrasi sesuai dengan PP 78 itu telah masuk, telah disampaikan ke Komisi II DPR, bahkan telah dibahas, pada DPR periode yang lalu. Masuk dalam 22 daerah otonomi baru yang dibahas paa DPR yang periode yang lalu. Karena kami juga ingin mendapatkan kepastian apakah harus kami ulangi persyaratannya, rasanya kalau memang harus kami ulangi, ini tentu kami juga sangat mengharapkan adanya waktu bagi kami untuk melengkapi ini, karena informasi ini pun baru hari ini kami terima, tapi kami juga sangat berharap karena ini secara persyaratan administrasi sudah lengkap pada periode yang lalu, mungkin ini juga dapat menjadi pertimbangan, karena kita masih mengacu pada PP 78 tersebut.

Nah seterusnya mungkin pada hari ini kita juga akan melakukan penyerahan untuk bahan-bahan atau persyaratan Indragiri Hilir Utara.

Saya rasa ini Pak satu saja harapan kami khusus kepada Pak Lukman Edy yang kebetulan memimpin acara rapat pada hari ini kami sangat berharap, saya atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, kami sangat berharap dan bermohon kiranya pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir ini, sama-sama kita perjuangkan untuk dapat terlaksana pada tahun 2015 ini.

Saya rasa demikian sekali lagggi atas nama rombongan kami mengucapkan terima kasih karena kami telah diterima untuk dapat beraudiensi pada kesempatan ini.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

barakatur,

Terima kasih Pak Asisten, sebelum kita tutup rapat ini,
Teman-teman anggota mungkin ada pesan dan kesan untuk disampaikan.

F-HANURA (Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, SH., MM., MH):

Terima kasih Pimpinan, atas kesempatan ini, jadi sudah jelas tadi keinginan ini memang disampaikan saja, kalau perlu tagih janji, tagih janji, apa sikapnya, karena begini pak, tidak bisa pertanyaan tadi kita jawab ressertnya, hasilnya kami melalui mekanisme proses pak, jadi jangan disandera Komisi II ini, makanya saya bilang tidak usah basa basi banyak, harusnya datang serahkan Pak begini-begini, kan selesai.

Jadi hanya ingin menjawab yang tadi tidak bisa kita membuat suatu komitmen karena ini komisi II ini terdiri dari 10 Fraksi, ini kita juga dari DPRD mengetahui itu, proses itu, mekanisme itu, apakah nanti komisi yang menyerahkan, apakah nanti fraksi yang menyerahkan, atau bagaimana?, nantikan akan ada rapat internal, jadi yang pasti mungkin pimpinan hari ini hanya cukup kita menerima untuk sementara kita menerima masukan ini, jangan diputuskan dulu Pimpinan, jadi supaya nanti proses ini bisa berlanjut dengan cepat itu barangkali, terima kasih Pimpinan.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM)

Ya terima kasih Pimpinan, jadi untuk teman-teman dari Indragiri Hilir dan tentu perjuangan yang sudah cukup panjang melelahkan ini, saya ingin memberikan saran bahwa hari ini itu memang terakhirnya untuk di programkan di Prolegnas 2014-2019, jadi sangat terbatas. Apalagi kalau memang ada kotanya hanya 25 ya jadi saya pikir kan ada wakil dari kepulauan Riau, dari provinsi Riau yang ada di DPR RI saya juga tidak tahu teman-teman di Komisi II ini siapa yang itu, harusnya beliau yang ikut aktif ya kalau memang Pak Menteri yang ini, ini lebih save lagi, tapi ada satu hal yang menarik dari teman saya di sebelah ini, jangan di sandera, artinya jangan nanti kalau umpamanya tertolak dan gagal menjadi kesalahan, saya kira teman-teman di Komisi II ini memang tulus saja ingin membantu, dengan tulus, karena kami juga mempunyai perasaan yang sama, saya mungkin sedikit latar belakang saya pernah jadi bupati 2 periode, disatu pemekaran di Kalimantan Tengah dan luar biasa, karena dengan adanya pemekaran itu percepatan pembangunan, kesejahteraan dan lain-lain itu, sangat terasa.

Nah oleh karena itu apa yang disampaikan tadi kami sangat sudah paham dan tahu ya akibat dari pemekaran itu, ya itu tadi kesejahteraan tadi dari masyarakat, dan kami yakin kami artinya sangat mendorong apalagi ada Pak Lukman Edy yang merupakan orang yang akan membantu mengawal, artinya harus dikawal, kalau tidak dikawal ya mungkin walaupun beliau sebagai Ketua ini badannya gede itu tidak perlu di kawal, perlu saya pikir kenapa? karena banyak rintangan juga yang harus dihadapi karena berebut untuk 25 kota, sedangkan yang mau dimekarkan itu ratusan, jadi yang mana yang paling kuat, yang paling kuat maksudnya yang paling lebih duluan persyaratan, kemudian kebutuhan dan sebagainya, dan tentu yang terakhir nanti adalah persiapan untuk seluruh anggota dewan termasuk juga otonomi daerah dan lain-lain yang berkepentingan untuk meninjau ke lapangan, itu yang juga perlu disiapkan. Karena administrasi sudah ok, ya ternyata waktu dilihat di sana ada banyak masalah umpamanya, jadi itu juga kami yakin itu pasti tidak ada karena sudah persiapan yang luar biasa ini.

Mungkin itu masukan kami, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatur.

Nama kami Willy M. Yoseph fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Kalimantan Tengah no. 220.

Silakan pak Bambang.

F-GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, SH., MH., M.Si):

Terima kasih Pimpinan, kawan-kawan yang dari Indragiri Hilir ya? kalau tidak salah dulu Bupati saya kenal itu masyarakat, kakaknya Pak Menteri ini ya? satu masa saya jadi bupati Sukoarjo itu tahun 2005, kemudian berlanjut 2005-2010 saya jadi anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra itu dengan keinginan yang tulus hati yang tulus, saya memang terkaget-kaget hari ini baru ketemu bahasanya sudah meledak-ledak, seakan-akan kami ini berdosa, saya merasa demikian, Bapak dan Ibu ya, padahal saya kesini juga dengan niat tulus, kawan-kawan juga seperti itu. Latar belakang apa saja sudahlah kita tutup, kita buka lembaran baru kami sudah tahu maksud kedatangan Bapak Bu ke sini, bahwa kesini itu adalah tempat yang tepat untuk menyampaikan sebuah keinginan, sayapun dengan hati tulus dengan ucapan yang ikhlas saya sampaikan tolong dicatat baik-baik, kami tidak ada komitmen apapun terkait dengan finansial, kami tidak butuh cukong, kami tidak butuh amplop, kami pun akan menolak setiap pemberian dari panjenengan semua, itu komitmen kami. Bahwa disini memberikan berkas yang lalu, saya belum tahu apa apa, pemekaran yang dimaksud itu untuk 1, 2 atau 3 Kabupaten yang disampaikan, tadi kan juga belum jelas, ada Indragiri Hilir Selatan, ada Utara itu yang akan dipecah jadi satu Kabupaten menjadi 3 Kabupaten, begitu mungkin lebih simple di sampaikan itu selesai.

Sehingga kesimpulan saya kalian panjenengan semua datang ke sini untuk menyampaikan pemekaran satu Kabupaten menjadi 3 Kabupaten. Kabupaten induk adalah Indragiri Hilir, menjadi Indragiri Hilir, Indragiri Selatan dan Indragiri Utara mungkin ini sebagai kesimpulan kami karena kebetulan anggota komisi II yang di Baleg sedang membahas Prolegnas, hari ini Pak Rufinus itu nanti biar masukan atau kesimpulan ini di bawa Pak Rufinus untuk di bahas di Baleg akan masuk dalam Prolegnas, ini gratis tidak usah mengeluarkan biaya apapun, tolong itu dicatat baik-baik, yang lalu sudah kita anggap selesai untuk ke depannya jangan sampai ada statement, pernyataan seperti tadi siap ya Bapak dan Ibu ya?

Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Bambang, khas Surakarta ya, itu kalau orang Solo menyampaikan Pak Riza, Pak Wakil Ketua, sudah cukup ya? saya kira kita semua dukung ini, dan kami menyatakan bahwa Bapak-bapak dan Ibu hari ini ke Komisi II ini adalah jalan yang tepat, on the track saya kira baru sekali ini soal pemekaran di Komisi II ya kan? sebelumnya tidak pernah. Dulu-dulu pernah karena dalam apa namanya catatan kita, Inhil Selatan, Inhil Utara belum pernah dimasukkan, Inhil Selatan sudah masuk tapi lewat Baleg, dari kementerian Dalam Negeri tidak diusulkan, muncul dari Baleg, dari Baleg kemudian masuklah 22 itu.

Nah sekarang kita ingin semuanya karena dimulai dari awal mulai dari nol lagi kita lewat jalur-jalur yang tepat, karena kalau jalannya salah, itu high cost tadi karena jalan salah belok sana, belok sini, sehingga kemudian menimbulkan kosekuensi yang high cost, yang tidak kita inginkan, tapi kalau jalannya benar, sesuai ketentuan maka apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak tadi akan Bapak alamilah itu jalur yang benar itu.

Saya kira itu mungkin rapat ini kita tutup dulu, kemudian silakan Bapak-bapak mau menyerahkan dokumen-dokumen apa yang diserahkan kami bisa terima.

Sekian,



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

DITUTUP PUKUL 15.00 WIB)

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Jakarta, 3 Februari 2015
Ketua Rapat

Ttd

Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
A-39